

POTENSI DAN MASLAH

Permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi dalam 1 (satu) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perencanaan yang dapat memecahkan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan.

Dalam analisis strategi, dibutuhkan upaya pengenalan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat dipecahkan, sedangkan analisis lingkungan eksternal adalah upaya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

1) Masalah Dalam Konteks Pembangunan Desa:

1.1. Dari sisi Perencanaan;

Aktivitas perencanaan pembangunan desa masih belum memberikan arah dan pedoman yang lebih fokus dan optimal, dikarenakan:

- a) Belum didukung oleh data yang akurat (aktual dan faktual).
- b) Kurangnya kapasitas SDM perencana yang profesional di desa.
- c) Kurang didukung oleh sumber daya yang memadai.

1.2. Dari sisi implementasi masih menghadapi persoalan antara lain:

- a) Masalah dukungan terhadap aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) Masalah transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai hasil kinerja yang diharapkan.
- c) Masalah keswadayaan dan partisipasi masyarakat serta control masyarakat yang masih lemah (memunculkan budaya baru

ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, kreativitas dan daya juang yang menurun).

d) Masalah penyelesaian ketimpangan pembangunan antar wilayah.

1.3. Dalam Konteks Bidang Pemerintahan dan Tata Ruang

Persoalan yang cukup kompleks terutama dari sisi manajemen pemerintahan desa yaitu:

a) Belum terbangunnya sistem dan mekanisme dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

b) Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.

c) Masih belum optimalnya konsistensi implementasi rencana tata ruang dan pengendalian.

d) Terjadinya penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup.

1.4. Dalam Konteks Bidang Ekonomi

a) Akses dan penciptaan lapangan kerja yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia.

b) Masih tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan di desa.

c) Daya beli masyarakat yang masih rendah.

d) Iklim investasi yang belum kondusif dalam menunjang aktivitas perekonomian di desa.

1.5. Dalam Konteks Bidang Infrastruktur Desa

a) Masih rendahnya kualitas penyediaan infrastruktur desa dalam mendukung aktifitas pembangunan perekonomian di desa.

b) Lambatnya penyelesaian sejumlah rencana pembangunan infrastruktur di desa strategis.

c) Masih lemahnya, investasi dalam bidang infrastruktur di desa.

1.6. Dari Aspek Bidang Sosial dan Budaya

a) Masih belum memadainya sebagian sarana prasarana infrastruktur pendidikan dasar.

b) Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya).

- c) Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran di desa.
- d) Kesenian tradisional masih belum mampu menjadikan modal sosial sebagai daya ungkit pembangunan budaya daerah.
- e) Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral pelaku pembangunan dan kesetaraan gender.

1.7. Dari Aspek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

- a) Masih belum mampu menjadi feed back bagi input perbaikan pencapaian target-target program yang telah ditetapkan.
- b) Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana yang memberikan dukungan terhadap aktivitas monitoring dan evaluasi yang efektif.
- c) Masih dipahami hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban perlunya setiap pelaksanaan aktifitas program dan kegiatan pembangunan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi yang output hasilnya tanpa makna.
- d) Masih kurang relevannya data dan informasi yang dibutuhkan sehingga tidak mampu memberikan perbaikan program serta input perencanaan tahun berikutnya

2) Faktor Pendorong:

2.1. Kekuatan

- a) Letak geografis Desa Tanjungsari yang strategis dalam struktur kewilayahan karena merupakan dilintasi Jalan Provinsi.
- b) Stabilitas keamanan di desa yang kondusif dan terjaga dengan baik.
- c) Hubungan ke pemerintahan yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan BPD yang mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi.
- d) Jumlah aparatur Perangkat Desa yang relatif cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
- e) Peningkatan peran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa yang dilandasi oleh semangat otonom.
- f) Kesenian tradisional masih belum mampu menjadikan modal sosial sebagai daya ungkit pembangunan budaya daerah.

g) Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral pelaku pembangunan dan kesetaraan gender.

1.8. Dari Aspek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

e) Masih belum mampu menjadi feed back bagi input perbaikan pencapaian target-target program yang telah ditetapkan.

f) Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana yang memberikan dukungan terhadap aktivitas monitoring dan evaluasi yang efektif.

g) Masih dipahami hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban perlunya setiap pelaksanaan aktifitas program dan kegiatan pembangunan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi yang output hasilnya tanpa makna.

h) Masih kurang relevannya data dan informasi yang dibutuhkan sehingga tidak mampu memberikan perbaikan program serta input perencanaan tahun berikutnya

3) Faktor Pendorong:

2.2. Kekuatan

f) Letak geografis Desa Tanjungsari yang strategis dalam struktur kewilayahan karena merupakan dilintasi Jalan Provinsi.

g) Stabilitas keamanan di desa yang kondusif dan terjaga dengan baik.

h) Hubungan ke pemerintahan yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan BPD yang mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi.

i) Jumlah aparatur Perangkat Desa yang relatif cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

j) Peningkatan peran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa yang dilandasi oleh semangat otonom.